

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

#### C. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah. Objek penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa dengan periode 2013-2015. Dari kriteria-kriteria yang di tentukan, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 80 sampel per tahun, sehingga total observasi digunakan berjumlah 240 observasi.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan negatif tidak signifikan antara ukuran pemerintah dengan kelemahan sistem pengendalian internal. Artinya apabila ukuran pemerintah meningkat belum tentu memiliki kelemahan sistem pengendalian internal yang tinggi juga, begitupun sebaliknya. Sehingga pemerintah daerah yang memiliki ukuran (total aset) yang tinggi maupun rendah dituntut untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap pengendalian internalnya dikarenakan keduanya memiliki kemungkinan terjadi penyimpangan akibat lemahnya pengendalian internal yang dimiliki.
2. Belanja modal memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Artinya apabila belanja modal

meningkat, belum tentu terjadi peningkatan pada kelemahan sistem pengendalian internal, begitupun sebaliknya.

3. Produk domestik regional bruto memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB maka kelemahan SPI akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena pertumbuhan yang cepat atau tinggi akan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerahnya dan lebih rentan menghadapi masalah-masalah pada pengendalian internal.
4. Pendapatan asli daerah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat maka akan terjadi peningkatan pada kelemahan SPI nya. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam mengelola daerahnya, terutama terhadap pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Besarnya dana PAD yang dikelola dan luasnya kewenangan yang dimiliki menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga menyebabkan kelemahan sistem pengendalian internal menjadi tinggi.

#### **D. Implikasi**

Kelemahan sistem pengendalian internal dapat memicu terjadinya penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian daerah. Pentingnya informasi mengenai penyebab terjadinya kelemahan sistem pengendalian internal membuat semakin dibutuhkannya sebagai dasar dalam menentukan

perencanaan bagi pemerintah daerah, pihak eksternal, regulator, maupun auditor terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan yang lebih ketat agar pengendalian internal dapat dijalankan dengan baik dan konsisten.

Bagi para pemerintah daerah yang menyusun strategi bagaimana cara agar pemahaman sistem pengendalian internal dapat memadai, produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah dapat menjadi salah satu motivasi untuk meminimalisir kelemahan SPI sebab pemerintah daerah yang mampu mengelola keduanya dengan baik akan semakin menunjukkan kepada pihak eksternal bahwa pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan memadai. Pemerintah daerah yang memiliki opini wajar dalam laporan keuangannya akan lebih baik jika tidak ada kelemahan sistem pengendalian internal didalamnya.

Bagi pihak eksternal, mereka dapat melihat dan menilai seberapa besar kelayakan laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya dengan melihat temuan kasus pemeriksaan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah yang besar cenderung memiliki masalah pengendalian internal yang lebih banyak.

Bagi pihak regulator, hasil penelitian ini dapat menambah literatur yang bisa dipertimbangkan dalam pembuatan peraturan dan sanksi yang tegas mengenai kelemahan sistem pengendalian internal. Dengan adanya peraturan mengenai SPI yang jelas, maka dapat mengurangi kelemahan-kelemahan yang

terjadi. Dan pihak auditor pemerintah daerah seperti BPK harus menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan yang diberikan terhadap pemda. Meskipun rekomendasi tersebut kadang diabaikan, tetapi ada beberapa pemda yang berusaha untuk memperbaikinya sehingga tidak terjadi lagi kelemahan yang serupa dan sistem pengendalian internalnya semakin baik.

### **E. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

1. Sampel penelitian ini terbatas hanya pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa sehingga kurang menggambarkan kondisi seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia.
2. Periode penelitian hanya tiga tahun, yaitu 2013, 2014, dan 2015.
3. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih terbatas atau rendah.

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memilih sampel di pulau sumatera atau meneliti seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia.
2. Menambah periode penelitian menjadi lima tahun untuk hasil yang lebih optimal.
3. Menggunakan variabel independen yang terbaru dikarenakan masih ada peluang untuk peneliti selanjutnya dalam mencari tahu variabel

independen yang mampu menjelaskan kelemahan sistem pengendalian internal, misalnya belanja operasi, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus.

4. Peneliti selanjutnya bisa memilih proksi lain untuk ukuran pemerintah, seperti jumlah penduduk.
5. Menggunakan pengukuran yang berbeda pada kelemahan pengendalian internal dengan memilih klasifikasi kelemahan pengendalian internal yang lebih spesifik misalnya hanya terbatas dibagian akuntansi.